

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, Mei. 2012. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Accounting Analysis Journal* 3 (1): 1–7. doi:ISSN 2252-6765.
- Arifin, Muhammad Naufal, Lillik Handajani, and Alamsyah. 2016. "Kualitas Laporan Keuangan Dan Kepercayaan StakeHolder (Studi Pada Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Mataram)." *JAFFA* 4 (2): 121–144.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. First ed. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Third ed. Jakarta: Erlangga.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Edisi Alih. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyani, Ni Made Mega, and I Made Karya Utama. 2015. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10 (3): 825–840.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul, and Ibnu Mujib. 2009. *Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Herawaty, Netty. 2011. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 13 (1975): 59–72.
- Jones, R., and M. Pendlebury. 1996. *Public Sector Accounting*. Fourth. London: Pitman Publishing.
- Kaltsum, Ummu, and Abdul Rohman. 2012. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga)." *Jurnal Akuntansi Diponegoro* 1 (1). Bandung: Alfabeta: 1–14.
- Kenis, Izzettin. 1979. "The Effect of Budgetary Goal Characteristics on Manajerial

Attitudes and Performance.” *Accounting Review* 54 (4): 707–721.

Kholis, Bayu Nur. 2007. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kluvers, Ron. 2001. “Program Budgeting and Accountability in Local Government.” *Australian Journal of Public Administration* 60 (2): 35–43.

Lumenta, Agnestasia Laura, Jenny Morasa, and Lidia Mawikere. 2016. “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan).” *Jurnal EMBA* 4 (3): 35–46.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publk*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.

Mainardes, E.W., Alves, H. and Mario Raposo. 2011. “Stakeholder theory: issue to resolve”. *Management Decision* 49 (2): 226-252.

Putri, Rizka Aulia. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” *Jurnal Online Mahasiswa* 4 (1): 20–34.

Roberts, R.W. 1992. “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory.” *Accounting, Organizations and Society* 17 (6): 595–612. doi:10.1016/0361-3682(92)90015-K.

Rofika, and Ardianto. 2014. “Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” *Jurnal Akuntansi* 2 (2): 197–209.

Rokhlinasari, Sri. 2016. “Teori-Teori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responbility Perbankan,” 1–11.

Setyawan, Hari. 2017. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Online Mahasiswa* 4 (1).

Solihin, Dadang. 2007. *Indikator Governance Dan Penerapannya Dalam Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS.

Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahdatul, Laura, Sri Rahayu, and Vaya Juliana Dillak. 2016. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung." *E-Proceeding of Management* 3 (2): 60–65.
- Wulandari, Risma Putri. 2009. "Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Persepsi A Paratur Pemerintah Daerah Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yuhertiana, Indrawati. 2003. "Principal Agent Theory Dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Sistem Informasi*, 9: 03–22.
- Yulianti, Reni. 2014. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Online Mahasiswa* 1 (2): 1–15.
- Zulharman, Khodri. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Online Mahasiswa* 2 (2).
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, <http://www.jdih.pu.go.id/peraturan-download.html?id=2040>
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/906.bpkp>
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=488>
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

<http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/432/permendagri-no-13-tahun-2006>

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/permendagri_58.pdf

Investor Daily Indonesia, “*Delapan Kali Berturut-turut Yogyakarta Raih WTP*”, 30 Mei 2017. <http://id.beritasatu.com/home/delapan-kali-berturut-turut-yogyakarta-raih-wtp/160833> (diakses 11 Februari 2018).